

ABSTRAK

PERANAN MAJELIS PENGAWASAN NOTARIS DALAM PENEGAKKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
NURUL FADILLAH PUTRI**

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung, serta faktor-faktor yang menghambat Majelis Pengawas daerah untuk melakukan pengawasan tugas Notaris di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris, serta penelitian hukum empiris dengan berdasarkan hasil riset pada Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Serta faktor-faktor penghambatnya antara lain dipengaruhi oleh masih banyak Notaris yang kurang atau belum memahami apa itu perbedaan serta tugas Majelis Pengawas daerah dan Dewan Kehormatan Notaris Daerah dan pola pikir Notaris yang berorientasi pada keuntungan materiil dalam pembuatan akta tersebut, bukan kebenaran substansi akta Notaris, serta minimnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada lembaga pengawasan Notaris.

Kata Kunci : Majelis Pengawas, Notaris

ABSTRACT

ROLE OF THE ASSEMBLY OF SUPERVISING THE NOTARY OF ENHANCING THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND NOTARY FUNCTIONS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

NURUL FADILLAH PUTRI

The Notary Supervisory Board as a body formed by the Minister of Law and Human Rights, not only applies to the examination and examination of Notaries, but also the use of special sanctions on Notaries who have been proven to violate the law against the applicable regulations stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. This study examines the Perum of the Regional Supervisory Agency on the Duties of Notaries in Bandar Lampung City, as well as the factors that disturb the Regional Supervisors to supervise Notary duties in Bandar Lampung City.

This research method uses normative and empirical methods based on legal facts derived from the substance of the regulation of information and notary code of ethics, as well as legal research using the results of research at the Secretariat of the Regional Supervisory Board of the Regional Office of the Department of Law and Human Rights in Lampung Province.

By using this method, the Notary Supervisory Board can use errors, irregularities, etc. which are not in accordance with the duties and authorities that have been determined. Supervision is not to find fault with the person, but to find fault with the results of the execution of his work. As well as the inhibiting factors include many Notaries who lack or do not understand what is part of the task of the Regional Oversight Council and the Honorary Board of the Notary Regional and the notary mindset that is oriented to material benefits in making the deed, not the truth of the substance of the Notary deed, and the lack of facilities and infrastructure provided to Notary supervision institutions.

Keywords: Supervisory Board, Notary